

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

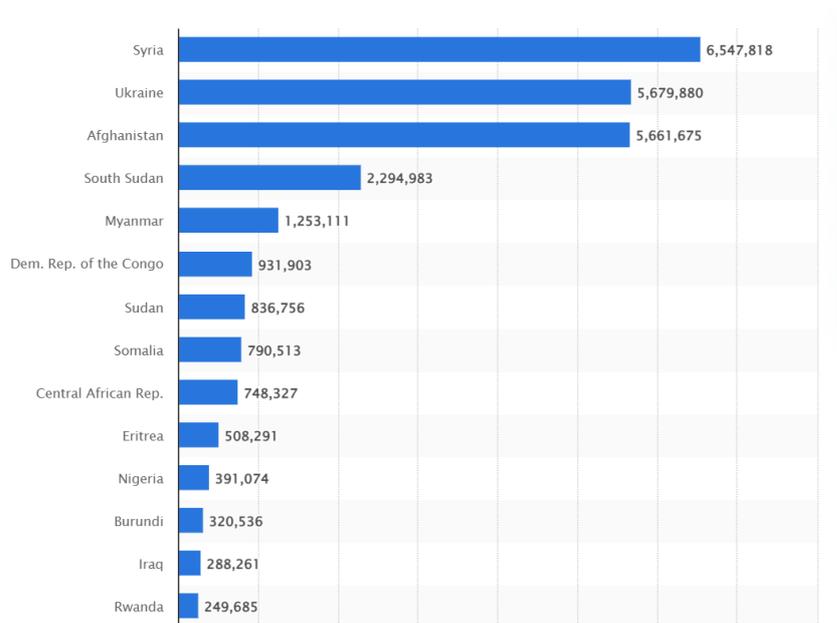
Adanya Perpindahan penduduk yang melewati batas negara memberikan dampak signifikan dalam beberapa tahun belakangan, terutama perpindahan penduduk dari negara berkembang ke negara maju. Adanya laporan di media mengenai konflik internal dalam suatu negara merupakan salah satu faktor perpindahan penduduk (Weiner, 1985). Di era kontemporer saat ini, isu mengenai migrasi merupakan salah satu isu global yang memiliki tantangan. Dimana imigran menjadi sasaran tindakan yang tidak sesuai dengan HAM, pelecehan, juga adanya proses integrasi yang sulit bagi para imigran di negara tujuan (Koser, 2007). Maka dari itu untuk mencegah adanya tindakan yang tidak diinginkan, serta menjamin hak asasi para imigran maka negara-negara di dunia internasional sepakat untuk membentuk suatu organisasi internasional yang menangani mengenai imigran. *United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR)* merupakan salah satu organisasi internasional sebagai bentuk untuk menjamin keselamatan dan hak asasi dari para imigran (UNHCR, 2022).

Salah satu contoh proses imigrasi dapat dilihat dalam proses imigrasi yang dilakukan oleh penduduk dari wilayah Timur Tengah dan Afrika. Adanya tingkat kemiskinan yang tinggi merupakan salah satu faktor pendorong imigrasi dari negara-negara konflik (Landesmann & Mara, 2021). Ketidakstabilan politik dan juga konflik internal yang melanda negara Suriah, Libya, Yaman, dan Iraq telah

menimbulkan dampak kerugian dari segi ekonomi maupun korban jiwa (OECD, 2016).

Grafik 1.1

Negara Pengirim Imigran Terbanyak di Dunia Tahun 2022



Sumber: (Statista, 2023)

Data diatas menunjukkan bahwa mayoritas imigran yang tersebar di berbagai belahan dunia berasal dari negara Suriah. Dimana Suriah menempati peringkat pertama negara yang mengirim imigran ke negara lain pada tahun 2022. Hal ini juga tidak lepas dari adanya konflik internal yang mulai terjadi pada tahun 2011 (Statista, 2023). Pada tahun 2015 merupakan puncak dari permasalahan adanya imigran yang datang ke wilayah Eropa. Dimana pada saat itu terjadi krisis pengungsi dan imigran di wilayah Eropa, hal tersebut dapat berimplikasi terhadap adanya perubahan dalam kebijakan suatu negara (Hagelund, 2020). Denmark

merupakan negara pertama yang menandatangani Konvensi PBB 1951 mengenai landasan hukum untuk melindungi para pengungsi/imigran dunia (UNHCR, 2021). Selain itu Denmark juga telah bekerja sama dengan UNCHR sejak tahun 1978 untuk menentukan jumlah kuota pengungsi yang ingin datang ke negaranya dengan penetapan kuota sebanyak 500 hingga 1500 orang pengungsi, dalam hal ini Denmark menerima jumlah pengungsi di UE lebih banyak daripada Jerman (NewToDenmark, 2015).

Namun, pada September 2015 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang telah mengalami perubahan cukup signifikan. Dimana negara Denmark memiliki kebijakan untuk mengurangi jumlah *asylum seekers* atau pencari suaka dan meningkatkan integrasi dari pengungsi (Kvist, 2016). Masalah yang terjadi di Denmark terkait imigran merupakan salah satu agenda bagi pemerintah Denmark, hal ini di buktikan dari adanya peningkatan jumlah imigran yang masuk ke negara Denmark khususnya yang berasal dari wilayah Timur Tengah dan Afrika (European Commission, 2022). Oleh karena itu pemerintah Denmark dengan tegas memperketat kebijakan mengenai para pencari suaka secara signifikan dengan beralih dari sistem integrasi menuju fokus perlindungan sementara dan repatriasi. Selain itu pemerintah Denmark juga telah melakukan kampanye mengenai anti-imigran secara agresif dengan cara melakukan penyitaan aset dan barang berharga milik para pencari suaka (BBC, 2021).

Urgensi dari adanya penelitian ini adalah penulis ingin menganalisis alasan mengapa Denmark membuat kebijakan anti-imigran bagi imigran yang berasal dari

Timur Tengah dan Afrika, khususnya negara Suriah. Hal ini didasari oleh sejarah Denmark merupakan negara pertama yang menandatangani perjanjian mengenai imigran dan pengungsi di Konvensi 1951.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis merumuskan suatu masalah yang nantinya akan dijawab dalam penelitian ini mengenai. **“Mengapa negara Denmark menerapkan kebijakan anti-imigran bagi imigran dari wilayah Suriah?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Khusus

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai faktor mengapa negara Denmark menerapkan kebijakan anti-imigran bagi imigran yang berasal dari wilayah Suriah.

1.3.2 Tujuan Umum

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami mengapa suatu negara menerapkan kebijakan anti-imigran terhadap imigran-imigran yang berasal dari wilayah Suriah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi pesntudi Hubungan Internasional mengenai kolerasi antara pengaruh imigran terhadap perubahan kebijakan luar negeri suatu negara seperti adanya kebijakan anti-imigran terhadap imigran dari wilayah Suriah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan rujukan bagi pembuat kebijakan agar lebih mempertimbangkan dalam membuat kebijakan

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1 Literature Review

Dalam membahas mengenai penelitian yang akan dibawakan oleh penulis, penulis menyertakan beberapa tulisan yang mendukung dalam penelitian ini. Beberapa *literature* yang telah didapatkan oleh penulis berupa jurnal, artikel, dan laporan yang memuat beberapa bahasan tema yang akan dibawakan oleh penulis.

Tulisan *Pertama*, yakni Jurnal “*A decade of suspicion: Islam and Muslims in Denmark after 9/11*” karya Mikkel Rytter & Marianne Holm Pedersen yang menjelaskan mengenai bagaimana perilaku negara Denmark dalam memperlakukan para imigran muslim yang berasal dari luar Denmark seperti Timur Tengah dan Afrika. Dalam tulisan ini juga menjelaskan mengenai bagaimana perubahan politik di Denmark yang mengakibatkan adanya perubahan kebijakan di negara Denmark.

Tulisan *Kedua*, penulis mendapatkan sumber Jurnal yang berjudul *“European Islamophobia Report 2019”* karya Enes Bayrakli, Farid Hafez, dan Amani Hassani yang menjelaskan mengenai tindakan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat Denmark yang mendiskriminasi masyarakat yang beragama muslim. Selain itu dalam buku ini juga menjelaskan mengenai kondisi politik di Denmark yang secara tidak langsung berpengaruh pada kebijakan negara Denmark.

Tulisan *Ketiga*, penulis mendapatkan buku yang berjudul *“Terrorists created? The Radicalization of Muslim in Denmark”* karya Yanique A. Anderson. Dalam buku ini menjelaskan mengenai adanya pergeseran budaya dari liberal menuju nasionalisme, dimana adanya partai populis sayap kanan telah berupaya melindungi budaya yang ada di Denmark seperti budaya, bahasa, dan norma sosial.

Tulisan *Keempat*, penulis mendapatkan sumber Jurnal yang berjudul *“After the refugee crisis: public discourse and policy change in Denmark, Norway, and Sweden”* karya Anniken Hagelund. Dalam jurnal ini membahas mengenai adanya perubahan kebijakan di negara Scandinavia yakni Denmark, Norwegia, dan Swedia pasca Krisis Pengungsi. Jurnal ini menjelaskan respon dari ketiga negara tersebut mengenai krisis pengungsi yang terjadi dengan cara yang berbeda-beda. Selain itu Jurnal ini menjelaskan bagaimana aktor politik berpengaruh terhadap perubahan kebijakan ketiga negara tersebut.

Tulisan *Kelima*, penulis mendapatkan sumber Jurnal yang berjudul *“Peasants and Danes: The Danish National Identity and Political Culture”* karya Uffe Ostergard. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai budaya Denmark yang telah ada sejak lama, serta sifat karakteristik dari masyarakat Denmark yang

mengedepankan kehangatan dan kepatuhan. Selain itu Jurnal ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut direalisasikan pada sistem politik Denmark sebelum terjadinya Perang Dunia.

1.5.2 State of The Art

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai dampak dari adanya peristiwa 9/11 yang mengakibatkan adanya islamophobia di Denmark, namun penelitian sebelumnya cenderung ke peristiwa 9/11. Penelitian lainnya juga memaparkan mengenai adanya pergeseran budaya oleh partai-partai politik yang berpengaruh di Denmark. Penelitian ini akan menawarkan pandangan alternatif untuk menganalisis mengapa Denmark membuat kebijakan anti-imigran bagi imigran dari wilayah Timur Tengah dan Afrika khususnya Suriah yang mayoritas beragama muslim. Penelitian terdahulu menjadi rujukan penulis untuk memperoleh data mengenai tindakan yang dilakukan Denmark kepada para imigran muslim yang dapat dikategorikan menjadi tindakan dan kebijakan anti-imigran oleh Denmark. Data dari penelitian sebelumnya mengenai perpolitikan internal Denmark yang membuat adanya persepsi mengenai anti-imigran di Denmark juga digunakan oleh penulis dalam menganalisis permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya hanya cenderung fokus pada konsep keamanan, faktor integrasi, serta peristiwa 9/11 sebagai data pendukung adanya perubahan kebijakan di Denmark.

1.5.3 Novelty

Disini penulis ingin menawarkan pandangan alternatif lainnya yang menganalisis mengenai adanya kebijakan anti-imigran dengan menggunakan teori *foreign decision making process* yang menjelaskan mengenai indikator pembentukan kebijakan suatu negara dan konsep *state identity* yang didasari oleh faktor non-material seperti budaya, sejarah, kepentingan, dan identitas negara Denmark. Selain itu penulis ingin menganalisis kekhawatiran masyarakat dan pemerintah Denmark akan pergeseran budaya oleh imigran yang beragama muslim sebagai bentuk dari *xenophobia* yang membuat terbentuknya kebijakan anti-imigran di Denmark. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tergolong merupakan penelitian yang menawarkan pandangan alternatif dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

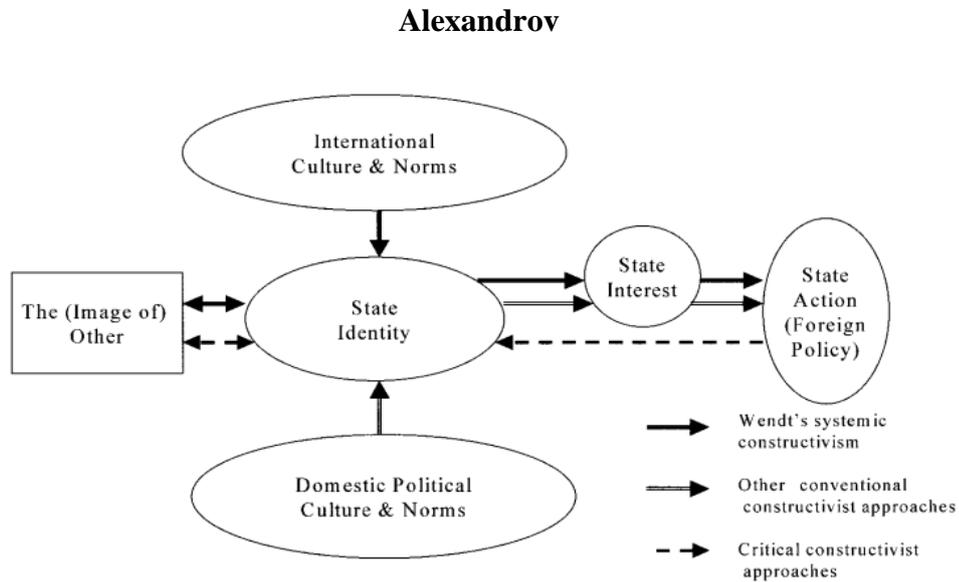
1.6 Kerangka Pemikiran Konseptual

Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan konsep *state identity* dan *foreign decision making process*. Konsep *state identity* berperan dalam menjelaskan kebijakan suatu negara yang muncul dari adanya faktor identitas dan kepentingan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Kemudian dalam *foreign decision making process* sebagai teori penguat untuk menjelaskan terbentuknya kebijakan suatu negara yang didasari oleh faktor internal dan eksternal di negara tersebut.

1.6.1 State Identity

State identity merupakan salah satu gambaran dalam mendefinisikan suatu budaya yang ada dalam suatu negara, sementara paradigma konstruktivis mendefinisikan identitas sebagai keyakinan sosial bersama (Alexandrov, 2003). Identitas negara memiliki dua dimensi, yakni dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal dari identitas negara mengacu pada representasi dan keyakinan yang dipegang oleh para kaum elit dan masyarakat dalam negara tersebut, sementara dimensi eksternal dari identitas negara merupakan representasi dan keyakinan dari kaum elit dan dimata negara lain (Alexandrov, 2003). Untuk alur pemikiran mengenai konsep *State Identity* dari *Maxym Alexandrov* dapat dilihat pada **Gambar 1.1** dibawah ini.

Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran Konsep *State Identity* Menurut Maxym



Sumber: Alexandrov, M. (2003). The Concept of State Identity in International Relations: A Theoretical Analysis. *Journal Of International Development And Cooperation*.

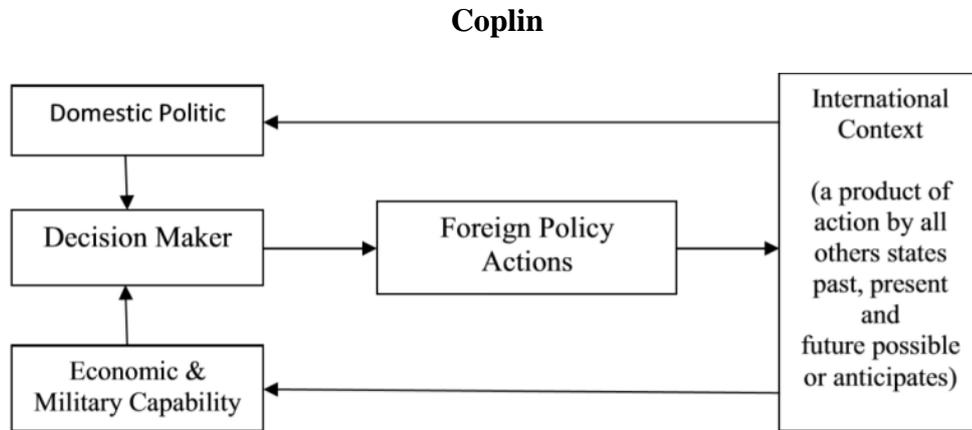
Pada **gambar 1.1** diatas Alexandrov membuat skema alur pembentukan identitas yang didasari pada faktor *International Culture & Norms*, *The Image of Other*, dan *Domestical Political Culture & Norms* yang kemudian terbentuklah suatu *State Identity* yang menghasilkan *State Interest* yang kemudian dituangkan kedalam suatu kebijakan atau *State Action (Foreign Policy)*. Adanya suatu dinamika dari identitas negara sering kali dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri, sehingga hal ini dapat meluas ke ranah hubungan internasional (Bloom, 1990). (Jepperson, 1996) menjelaskan bahwa kebijakan negara yang dibuat secara sengaja, serta bagaimana peristiwa kebijakan negara dapat mempengaruhi evolusi identitas negara. Selain itu bagaimana pemberlakuan dari identitas tersebut dapat mempengaruhi struktur sistem internasional tempat mereka berasal. Dilihat dari

sudut pandang ini (Adler, 2013 : 113) menjelaskan bahwa identitas bukanlah suatu benda dan hal yang ada, namun identitas juga dapat berkembang dalam pembentukan dan dengan adanya interaksi.

1.6.2 Foreign Policy Decision Making Process

Dalam buku *Introduction to International Politics: a Theoretical Overview* karya William D. Coplin (1973), menjelaskan bahwa adanya kebijakan luar negeri dalam suatu negara merupakan hasil dari keputusan yang berkaitan dengan hubungan antar bangsa dan negara. Adanya kebijakan merupakan cara negara dalam menyikapi isu yang berkembang dalam dunia internasional (Coplin, 1973). Dalam Teori *Foreign Policy Decision Making Process* Coplin membagi empat faktor determinan dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri. Coplin berusaha untuk melihat interaksi di antara empat faktor tersebut agar menghasilkan pola perilaku politik luar negeri tertentu (Coplin, 1973).

Gambar 1.2: Foreign Policy Decision Making Process menurut William D.



Sumber: William D. Coplin, *Introduction to International Politics: a Theoretical Overview*, (1973).

Gambar 1.2 diatas memperlihatkan bahwa Coplin telah membuat faktor untuk mempermudah operasionalisasi teori. Keempat faktor tersebut di antaranya: konteks internasional, politik domestik, pengambilan keputusan, serta kemampuan ekonomi & militer (Coplin, 1973).

1. Konteks Internasional (*International context*)

Dalam indikator konteks internasional dijelaskan bahwa negara merupakan wilayah yang memiliki posisi untuk melakukan hubungan kerjasama ekonomi dan politik dengan negara lain dalam sistem politik internasional. Maka dari itu, Coplin membagi tiga faktor dasar guna menjelaskan bagaimana konteks internasional dapat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Tiga faktor tersebut berupa geografis, ekonomi, dan politik (Coplin, 1973). Disini Coplin juga menambahkan bahwa, konteks internasional yang memiliki peran penting dalam menjabarkan politik luar negeri tidak dapat menjadi indikator utama untuk menjelaskan alasan

sebab-akibat dari adanya kebijakan suatu negara. Indikator konteks internasional hanya menjelaskan politik luar negeri secara keseluruhan dan ditambah dengan faktor pendukung yang lain (Coplin, 1973).

2. Pengambil Keputusan (*Decision Maker*)

Terdapat berbagai literatur yang menjelaskan mengenai politik luar negeri, adanya kebijakan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari faktor kepribadian seorang pemimpin negara dalam mengambil keputusan. Coplin menganggap manusia adalah makhluk pemecah masalah yang memiliki sifat rasional. Ia memberikan pemahaman bahwa dalam melakukan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, karakteristik dari setiap individu dari pemimpin yang berbeda merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses tersebut. Peran kepribadian yang dijelaskan oleh Coplin ini disebut dengan 'variable idosinkratik' (Rosenau, 2005).

Adanya dorongan psikologis dapat mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan oleh setiap pemimpin. Indikator dalam diri pemimpin seperti *image* atau citra adalah konsep yang penting (Hudson, 2005). Citra merupakan sesuatu yang muncul dari seseorang saat mempelajari lingkungannya, bersamaan dengan terjadinya proses interaksi sikap dan asumsi yang selalu berkembang. Dalam bukunya, (Coplin, 1973) menjelaskan bahwa citra terbagi menjadi dua, yakni citra terbuka dan tertutup. Citra terbuka menandakan sifat yang fleksibel atau progresif, sedangkan citra tertutup lebih menandakan sifat konservatif. Namun, seorang

pemimpin dapat memiliki citra yang relatif tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi.

3. Politik Dalam Negeri (*Domestic Politics*)

William D. Coplin berpendapat bahwa adanya suatu kebijakan luar negeri merupakan hasil dari adanya proses politik domestik oleh aktor dalam suatu kondisi tertentu. Adanya interaksi yang dilakukan oleh pengambil keputusan dan aktor politik dalam negeri menyebabkan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Coplin menjelaskan mengenai definisi dari aktor dalam negeri yang disebut *policy influencer*. Adanya interaksi dari aktor domestik dapat disebut *policy influence system*. Oleh karena itu, peran dari *policy influencer* dibutuhkan oleh pengambil keputusan sebagai faktor pendukung bagi mereka. Begitu juga sebaliknya, *decision maker* juga memegang kunci untuk mempermudah *policy influencer* dalam hal politik domestik. Dalam berbagai sistem pemerintahan demokrasi maupun autokrasi hal ini sangat berlaku. Dalam menganalisis struktur sistem pengaruh kebijakan, Coplin membaginya menjadi dua konsep, yakni:

a) Pembedaan Sistem Politik

Pembedaan sistem politik dari R. Barry Farrel yang mengemukakan istilah politik terbuka sebagai persamaan dari demokrasi konstitusional. Sistem politik terbuka memiliki karakteristik dewan legislasi dua dalam lembaga politik dapat menggantikan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan, dan pemilu regular yang kompetitif.

Kemudian mengenai sistem politik tertutup yang memiliki karakteristik seperti terdiri dari satu partai tunggal, partai yang mendominasi sarana media massa, pemerintah pusat yang mengontrol perekonomian, terlebih yang mewakili serikat kelompok pekerja, dan adanya suatu ideologi resmi (Coplin, 1973).

b) Empat Kategori *Policy Influencer*

Coplin menjelaskan bahwa konsep kedua didasarkan dari kategori *policy influencer*. Ia membagi *policy influencer* menjadi empat kategori, yakni: *Bureaucratic Influencer*, *Partisan Influencer*, *Interest Influencer*, *Mass Influencer* (Coplin, 1973).

Tipe pertama adalah *Bureaucratic Influencer*, kategori ini dapat mempengaruhi pengambil keputusan menggunakan menggunakan sistem informasi pada tahap perumusan kebijakan dan proses administratif saat pengimplementasian kebijakan tersebut. Sedangkan pihak yang berlawanan atau oposisi cenderung dibatasi kontribusinya dengan berdalih atas dasar keamanan dan kerahasiaan.

Tipe Kedua adalah *partisan influencer*, dimana dalam hal ini bagaimana kehadiran partai politik mempengaruhi *decision maker*. Sesuai dengan tujuan dari adanya partai politik adalah menampung aspirasi menjadi tuntutan politis kepada *decision maker*. Dasarnya partai politik hanya berfokus pada kebijakan politik domestik dibandingkan dengan kebijakan luar negeri, namun kontribusi dari partai politik dalam perumusan kebijakan luar negeri cukup berpengaruh. Namun, kemampuannya terbatas dalam proses perumusan kebijakan luar negeri di negara

demokrasi. Hal ini karena sistem multipartai yang menuntut persaingan dan suara mayoritas. Berbeda hal di negara dengan sistem politik tertutup, kehadiran partai politik dalam perumusan kebijakan luar negeri dapat lebih berpengaruh terhadap kebijakan dengan efektif meskipun terbatas hanya sampai tahap prosesnya (Coplin, 1973).

Tipe Ketiga adalah *interest influencer*, dimana adanya pengaruh kepentingan memiliki dampak yang cukup besar dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari massa yang besar dapat mempengaruhi *decision maker* dan *partisan influencer* untuk memenangkan pemilu di negara tersebut.

Tipe Keempat yakni *mass influencer*, adanya pengaruh dari massa yang dimaksud merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Sistem politik dalam suatu negara memberikan dampak ke pengaruh dalam lapisan masyarakat. Negara dengan sistem politik tertutup lebih cenderung mengabaikan aspirasi atau suara dari masyarakatnya. Suara aspirasi dari masyarakat dapat dimanipulasi supaya memihak proses pengambilan kebijakan luar negeri. Hal ini diakibatkan dari adanya control langsung dari pemerintah yang menguasai media massa. Berbanding terbalik dengan negara yang menganuk sistem politik terbuka, aspirasi dari kalangan masyarakat lebih bebas dalam menyuarakan keinginan mereka dan lebih bebas dalam beropini.

4. Kemampuan Ekonomi & Militer (*Economy & Military Capability*)

Dalam Teori *Foreign Policy Decision Making*, faktor seperti ekonomi dan militer merupakan variabel yang berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Kemampuan militer suatu negara dapat meningkat apabila keadaan ekonomi negara tersebut makmur. Hal ini berlaku juga sebaliknya, ketika ekonomi suatu negara meningkat maka kekuatan militernya juga akan meningkat (Coplin, 1973).

a) *Economy Capability*

Dalam indikator *Economy Capability* Coplin menjelaskan bahwa produksi barang dan jasa dalam suatu negara merupakan tolak ukur kemampuan ekonomi di suatu negara. *Gross National Product (GNP)* merupakan salah satu indikator untuk mengukur total nilai barang dan jasa dalam waktu setahun. Kemudian untuk mengukur kekayaan rata-rata warga negara adalah dengan menggunakan *GNP Per-Kapita*.

Kapasitas suatu negara dalam perdagangan internasional merupakan salah satu cara untuk mengkaji kapasitas ekonomi suatu negara. Neraca pembayaran menurut Coplin dapat menjelaskan hubungan antar negara dan ekonomi internasional. Segala bentuk perdagangan baik dalam dan luar negeri dapat membentuk indikator neraca pembayaran.

Negara dengan keterbatasan dalam hal produksi yang hanya mengandalkan barang mentah dan pertanian disebut sebagai negara berkembang. Sebaliknya, negara maju memang memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam karena negara maju berfokus pada sektor industri dan jasa. Tetapi, negara maju lebih

diuntungkan karena pasar internasional yang cenderung stabil dibandingkan negara berkembang (Coplin, 1973).

b) *Military Capability*

Dalam indikator *Military Capability* suatu negara dapat dilihat dari berbagai indikator didalamnya, hal ini meliputi jumlah armada dan pasukan, tingkat pelatihan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang kemampuan militer negara tersebut. Kapasitas militer dalam suatu negara dilihat dari adanya faktor ketergantungan negara lain dalam hal pertahanan. Ketergantungan tersebut terbagi menjadi dua sektor yakni primer dan logistik, serta produk siap pakai dalam militer. Negara seperti AS, Tiongkok, dan Rusia memiliki pengaruh terhadap negara pembeli karena mereka merupakan negara produsen dan pemasok pertahanan (Coplin, 1973).

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Imigran

International Organization For Migration (IOM) mendefinisikan imigran merupakan seseorang yang berpindah dari tempat tinggalnya baik dalam satu negara atau diluar negeri karena berbagai alasan (IOM, 2020). Kemudian UNHCR juga mendefinisikan imigran sebagai setiap orang yang berada di luar suatu negara yang mana mereka adalah bagian dari warga negara, atau dalam hal orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, negara tempat lahir atau tempat tinggalnya.

Oleh karena itu, imigran merupakan istilah netral untuk menggambarkan sekelompok orang yang memiliki kesamaan yakni kurangnya keterikatan kewarganegaraan terhadap negara tujuan mereka (OHCHR, 2024).

1.7.1.2 Anti-Imigran

Munculnya anti-imigran dalam beberapa dekade belakangan didorong oleh adanya tindakan rasisme merupakan hal yang telah meningkat secara pesat. Adanya faktor penyebab seperti perbedaan budaya, sejarah, sosial dan ekonomi, dan juga politik turut menjadi penyebab adanya persepsi anti-imigran (Perroco, 2018). Persepsi mengenai anti-imigran dapat diartikan sebagai adanya sikap atau tindakan negatif terhadap seseorang yang dianggap sebagai kelompok tertentu, dalam mengukur hal ini adalah dengan melihat bagaimana pandangan masyarakat mengenai bagaimana cara memperlakukan imigran (Ashmore, 1970 : 253). Terbentuknya persepsi anti-imigran ini didukung juga oleh kekhawatiran serta kondisi sosial politik, selain itu adanya tindakan rasisme terhadap para imigran yang berasal dari wilayah Timur Tengah dan Afrika khususnya Suriah yang mayoritas beragama muslim (Perroco, 2018). Adanya ancaman simbolik juga dapat menjelaskan mengenai adanya persepsi anti-imigran di wilayah Eropa (McLaren, 2003).

1.7.1.3 State Identity

State identity merupakan salah satu dari beberapa faktor non-material seperti norma, budaya, ide, keyakinan. *State identity* dapat mendefinisikan aktor serta kepentingan aktor yang mempengaruhi tindakannya. *State identity* juga dapat

berubah sesuai dengan adanya interaksi yang dilakukan oleh aktor. Konsep dari *state identity* dapat dipahami sebagai suatu keyakinan mengenai pengertian diri sendiri dan yang lainnya sebagai upaya untuk mempertahankan apa yang dimaksud dengan “kita” (Alexandrov, 2003).

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Imigran

Imigran merupakan definisi bagi orang-orang dari negara tertentu yang meninggalkan atau berpindah ke negara lain dengan berbagai alasan. Baik faktor ekonomi, keamanan, politik, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam menganalisis mengenai kebijakan anti-imigran Denmark, penulis membutuhkan data seperti berikut:

1. Statistik jumlah negara pengirim imigran terbanyak di Dunia, khususnya Suriah dalam pengiriman imigran ke Denmark.
2. Respon pemerintah Denmark terhadap imigran dari negara Suriah.

1.7.2.2 Anti-Imigran

Adanya persepsi mengenai anti-imigran yang berkembang di Eropa, khususnya di Denmark tak lepas dari pandangan buruk mengenai masyarakat yang beragama muslim. Adanya perbedaan seperti budaya, agama, ras, politik, sejarah, dan sebagainya menjadi faktor pendukung adanya sikap anti-imigran yang berkembang di wilayah Eropa. Dalam menganalisis mengenai kebijakan anti-imigran negara Denmark penulis memerlukan data seperti berikut:

1. Latar belakang adanya kebijakan anti-imigran negara Denmark yang dilihat dari faktor politik domestik yang ada di negara Denmark.
2. Dinamika yang terjadi di Denmark sebagai akibat dari adanya imigran dari wilayah Suriah.

1.7.2.3 State Identity

State identity memiliki faktor-faktor non-material seperti budaya dan norma yang turut berperan dalam proses pembentukan suatu *state identity*. Kebijakan suatu negara dapat dipengaruhi oleh *state identity*. Dimana identitas mempengaruhi kepentingan, kepentingan menentukan tindakan suatu negara. Dalam menganalisis topik penelitian ini penulis memerlukan data seperti berikut:

1. Identitas negara Denmark, seperti budaya yang ada di Denmark dan dinamika politik yang ada di negara Denmark.
2. Sikap dan pandangan negara Denmark terhadap para imigran khususnya yang beragama muslim, hal ini dilihat dari sebelum dan pasca peristiwa 9/11, krisis pengungsi di tahun 2015, serta tindakan kriminal yang dilakukan oleh imigran muslim.

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini memiliki argumen utama bahwa adanya kebijakan anti-imigran di Denmark merupakan salah satu bentuk kekhawatiran atau *xenophobia* akan perbedaan identitas antara imigran dan masyarakat Denmark dari aspek seperti latar belakang budaya, ras, norma, dan agama. Serta bentuk dari adanya

islamophobia yang muncul akibat dari adanya *stereotype*, tindakan kriminal yang dilakukan oleh imigran, serta opini publik terkait agama muslim memiliki keterkaitan dengan adanya unsur terorisme dari peristiwa 9/11.

1.9 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Cresswel, 2013) merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana terjadinya suatu masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Proses dari penelitian kualitatif meliputi adanya pengumpulan data, analisis data, dan kemudian peneliti memberikan argumennya mengenai jawaban dari data-data yang telah di peroleh (Cresswel, 2013). Inti dari penelitian kualitatif adalah untuk menunjukkan penjelasan secara terperinci terhadap topik penelitian yang digunakan (Wyse, 2011). Metode penelitian kualitatif digunakan oleh penulis karena memungkinkan penulis dapat menganalisis dan mengeksplorasi mengenai topik yang diangkat melalui data-data yang telah diperoleh sebelumnya.

1.9.1 Tipe Penelitian

Jika dilihat dari tipe penelitiannya, penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat eksplanatif. Tipe penelitian eksplanatif menurut penulis dapat digunakan untuk menganalisis penyebab terjadinya suatu fenomena yang ingin diteliti dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan penelitian eksplanatif bersifat

menjelaskan hubungan dari setiap variable yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya (Zaluchu, 2020).

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini akan dilaksanakan secara kualitatif dan akan dilaksanakan di Kota Semarang. Selain itu, penelitian ini berbasis *desk research* dimana penulis mengumpulkan data-data lewat *study literature* (Bassot, 2022).

1.9.3 Subjek Penelitian

Beberapa subjek dalam penelitian ini adalah Denmark sebagai negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi pada tahun 1951, kebijakan anti-imigran dari negara Denmark terhadap para imigran, serta apa yang melatar belakangi Denmark membuat kebijakan anti-imigran bagi imigran dari wilayah Timur Tengah dan Afrika khususnya Suriah.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini nantinya adalah dapat berupa gambar, teks, kata-kata tertulis, tindakan dan peristiwa sosial yang terjadi di negara Denmark.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa sumber data primer melalui website resmi dari pemerintah, jurnal penelitian, dan buku. Sementara sumber data sekunder yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa artikel media massa, berita, dan lain sebagainya.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode desk research atau studi kepustakaan. Metode desk research berarti penulis tidak melakukan observasi langsung ke lapangan. Desk research dibagi menjadi dua bagian yakni internet research dan library research. Internet research berarti penulis mengumpulkan data dari internet seperti jurnal, artikel media massa, berita, dan sebagainya (Bassot, 2022). Sementara library research berarti penulis mengumpulkan data lewat buku, artikel, arsip dari perpustakaan.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis kongruen. Dimana metode ini memiliki fokus untuk mencocokkan data yang diperoleh dengan kerangka pemikiran yang agar menemukan sebab-akibat terjadinya suatu fenomena (Rosyidin, 2016 : 61-62).

1.9.8 Kualitas Data

Kualitas data yang digunakan dalam penelitian meliputi data-data yang bersifat kredibel dan terpercaya. Dalam penelitian ini penulis juga memperhatikan dalam menganalisis fenomena yang terjadi dari aspek seperti latar belakang budaya, politik, sosial ekonomi, dan historis.

1.9.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab yang nantinya akan di jelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah mengenai topik yang dipilih oleh penulis, rumusan masalah yang cantumkan oleh penulis, dan kerangka pemikiran konseptual yang akan menjawab rumusan masalah yang telah ada sebelumnya. Pada bab ini juga memuat mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis

BAB II: GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisikan data mengenai dinamika perkembangan kebijakan imigran yang masuk ke Denmark, perkembangan kebijakan anti-imigran di Denmark. Selain itu penulis akan menambahkan data-data mengenai partai politik yang berpengaruh di Denmark, sejarah dan identitas negara Denmark, respon pemerintah Denmark terhadap imigran dari wilayah Timur Tengah dan Afrika, khususnya Suriah, pandangan masyarakat Denmark terhadap imigran dari Suriah, serta tindakan para imigran dari wilayah Suriah yang membuat pemerintah Denmark melakukan pembatasan terhadap imigran dari wilayah tersebut.

BAB III: ANALISIS MASALAH

Pada bab ini berisi mengenai analisis dan pembahasan dari penulis mengenai alasan Denmark membuat kebijakan anti-imigran kepada imigran yang berasal dari wilayah Suriah.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini nantinya akan berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari topik penelitian yang dipilih oleh penulis.